

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIAYA PENGUJIAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
(BDKT) PADA DISPENRINDAG PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS



Oleh:

**SYAHRUL
NPM: 061501051**

PROGRAM PASCASARJANA

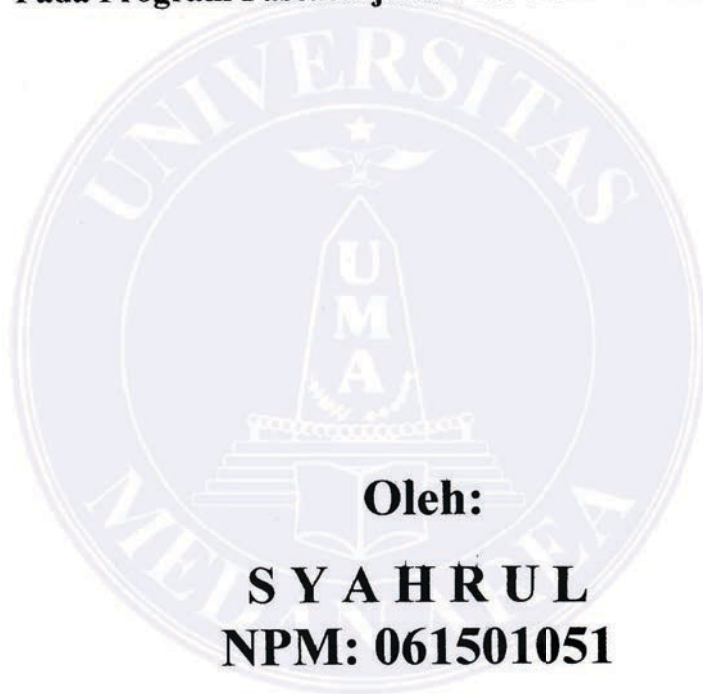
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2008

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIAYA PENGUJIAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
(BDKT) PADA DISPENRINDAG PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh:

**S Y A H R U L
NPM: 061501051**

PROGRAM PASCASARJANA

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIAYA PENGUJIAN BARANG
DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) PADA
DISPENRINDAG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : SYAHRUL

NIM : 061801051

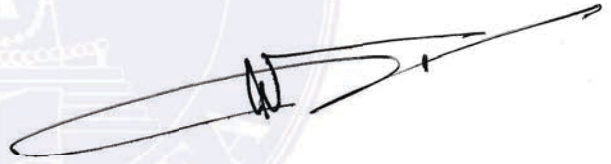
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Kariono, MA

Pembimbing II



Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



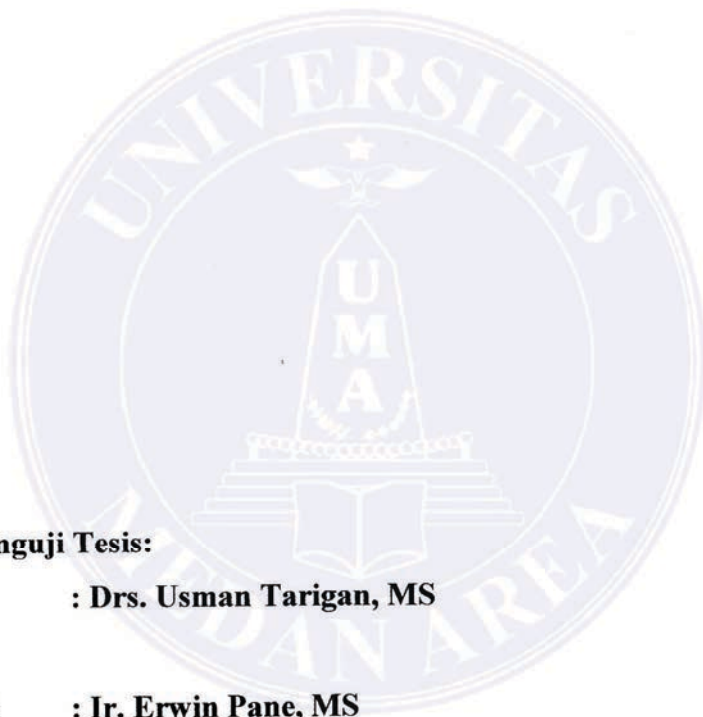
Drs. Kariono, MA

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah Diuji Pada Tanggal 30 April 2008



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS

Pembimbing I : Drs. Kariono, MA

Pembimbing II : Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Penguji Tamu : Drs. Heri Kusmanto, MA

ABSTRAKSI

Nama : Syahrul
Nomor Mahasiswa : 061801051
Pembimbing I : Drs. Kariono, MA
Pembimbing II : Drs. Burhanuddin Harahap, MA
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) PADA DISPENRINDAG PROVINSI SUMATERA UTARA.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang membeli atau mengkonsumsi suatu produk dalam keadaan terbungkus, Disperindag Provsu melakukan pengujian terhadap produk tersebut baik dari segi isinya maupun dari segi kualitasnya, apabila ditemukan produk yang merugikan konsumen akan diberikan peringatan atau penarikan produk dari pasar. Dengan hasil pengujian tersebut kepada pengusaha dikenakan biaya pengujian.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan kejadian pada masa sekarang kepada masa yang akan datang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, untuk menertibkan peredaran barang dalam keadaan terbungkus, Disperindag Provsu melakukan razia ke tempat-tempat perusahaan, pasar tradisional, Super Market, ke Grosir bersama-sama dengan Kepolisian, Balai POM dan instansi terkait, akan tetapi frekuensinya masih terbatas sehingga pemantauan belum maksimal. Niat baik pengusaha untuk mencantumkan label pada produknya belum maksimal, sehingga barang-barang yang beredar di pasaran masih banyak tidak memenuhi standar.

Dapat dikemukakan kesimpulan bahwa, barang dalam keadaan terbungkus yang beredar di Sumut belum seluruhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Pembelaan oleh ketua UKM kepada pengusaha kecil dan menengah menjadi alasan mereka untuk menghindarkan kewajiban membayar biaya BDKT. Untuk mengantisipasi produsen yang tidak memenuhi kewajibannya sebaiknya dikenakan sanksi secara adil dengan tetap memperhatikan kelangsungan usahanya dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen.

Kata kunci:

1. Pengujian
2. BDKT.
3. Disperindag Provsu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Ramat yang telah diberikan-Nya penulis telah dapat merampungkan penulisan Tesis yang berjudul, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) PADA DISPERINDAG PROVINSI SUMATERA UTARA”

Tesis ini ditulis melalui tahapan yang cukup panjang, penuh bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama para pembimbing, Koordinator Program, rekan sekerja, personil Disperindag, para sahabat, isteri tercinta ananda. Untuk itu penulis mengatutkan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Secara khusus penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Drs. Kariono, MA selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis sangat menyadari kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, kiranya tesis ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca.

Medan, 17 April 2008

Penulis

S YAHRUL

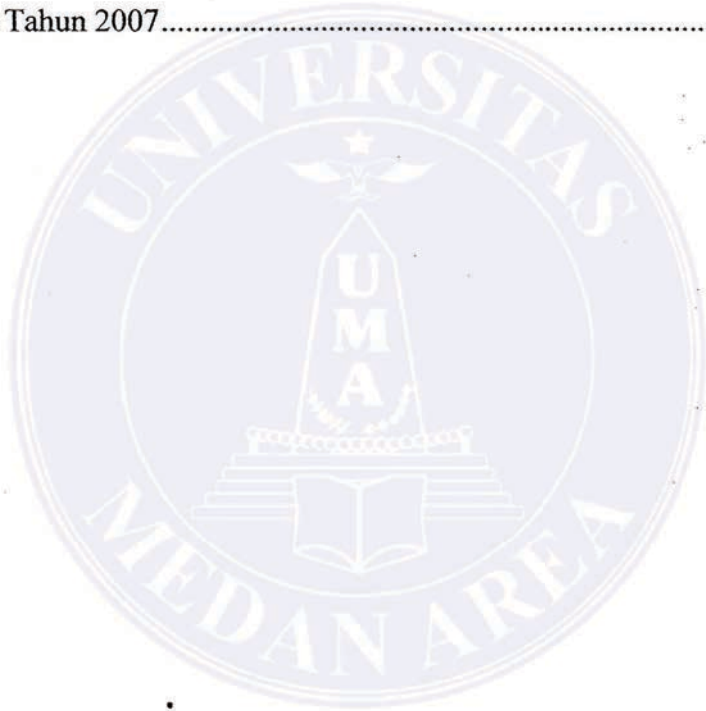
DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Implementasi.....	8
2.2. Teori Kebijakan Publik.....	13
2.3. Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.4. Industri Kecil Sebagai Katalisator Usaha Modernisasi Daerah.....	20
2.5. Kedudukan Industri Kecil dan Kerajinan Dalam Pembangunan Regional.....	31
2.6. Kebijakan Pungutan Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).....	37

BAB III	METODE PENELITIAN	39
	3.1. Bentuk Penelitian	39
	3.2. Lokasi Penelitian	39
	3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	39
	3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
	3.5. Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	4.1. Hasil Penelitian	42
	4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
	4.1.2. Industri Kecil di Sumut.....	56
	4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V	PENUTUP	65
	5.1. Kesimpulan	65
	5.2. Saran-saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel:	
1. Pejabat Yang Pernah Memangku Jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Dari Tahun 2001-2007	44
2. Jumlah Personil Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2007	46
3. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus (BDKT) di Sumatera Utara Tahun 2007.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya otonomi yang telah diberikan kepada suatu daerah, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber keuangannya sendiri. Sumber penerimaan atau keuangan ini, kemudian akan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD di daerah yang bersangkutan. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (UUD 45 dan amandemennya, 2007 : 9).

Sesuatu sumber penerimaan yang akan dikelola atau diusahakan oleh pemerintah daerah, ditetapkan dengan persetujuan Pemerintah Daerah yaitu antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dengan adanya persetujuan ini, menandakan adanya kesepakatan antara kepala daerah dengan rakyat atau masyarakat yang telah diwakili oleh para wakil-wakilnya di lembaga legislatif daerah. Persetujuan ini biasanya diterbitkan melalui Peraturan Daerah yang mengatur beberapa hal terkait dengan kepentingan daerah dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang sah. Untuk mengelola penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, berarti pemerintah daerah harus menetapkannya dengan menerbitkan Peraturan Daerah sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.

Retribusi sebagai sumber penerimaan daerah memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena dengan mengelola sektor retribusi akan menambah sektor penerimaan daerah di luar pajak daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan potensi dengan hasil yang diperoleh, sehingga tidak sampai terjadi biaya yang dikeluarkan untuk mengelola retribusi lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh.

Dalam wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara banyak terdapat industri-industri yang memproduksi barang dalam suatu kemasan atau dalam keadaan terbungkus sehingga konsumen tidak tahu persis isi dan mutu yang terkandung di dalamnya. Sektor industri yang memproduksi barang dalam kemasan baik berupa makanan maupun bukan makanan, harus dilakukan pengujian ataupun pengawasan sehingga konsumen sebagai pemakai produk tidak sampai dirugikan. Dengan melihat peluang yang demikian, maka Disperindag Provinsi Sumatera Utara menetapkan sektor tersebut sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pungutan retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pengaturan tentang retribusi ini diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2003 tentang Retribusi dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Dengan diterbitkannya Perda Nomor 3 tahun 2003 ini, maka pungutan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dunn, William. N, (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajahmada, University Press. Yogyakarta.
- Flippo B. Edwin, (1993), *Manajemen Personalia*, Erlangga, Jakarta.
- Hendro Susilo, (1992), *Pembinaan Industri Kecil Untuk Peningkatan Efisiensi*, Rosda Karya, Bandung
- Kartanto Fam Mardi, (1992), *Pembangunan Perindustrian di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, (1999), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, (1998), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, GM Press, Yogyakarta,
- Moekijat, (1995), *Kamus Administrasi Indonesia*, Bandar Maju, Bandung.
- Moleong, L.J., (1997), *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung,
- Mustopadidjaya, AR, (1992), *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan*, LP3ES, Jakarta.
- Nitisemito, Alex, S (1996), *Sebab-sebab Kegagalan Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1992) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit PN. Balai Putaka, Jakarta.
- Ranupandojo Heidjrachman, (1994), *Manajemen Personalia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Raharjo Dawam, (1996), *Peranan Industri dan Pembangunan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta.
- Roosadijo, (1995), *Kepemimpinan Administrasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siagian P. Sondang, (1995), *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta
- Sukadji, (1995), *Industri dalam Perkemabangannya*, Balai Pustaka Jakarta.

Surachmad Winarno, (1994), *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito Bandung.

----- (1997), *Analisis Kebijakan Publik*, PT. Dinar Wijaya, University Press. Brawijaya

Soenartadirja, (1991), *Industri Kecil dan Pembangunan Ekonomi*, Balai Pustaka Jakarta.

Thoha, Miftah, (1993), *Perilaku Organisasi*, CV. Rajawali, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Depdagri RI, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,m Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Perda Nomor 3 tahun 2003, tentang Retribusi tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) metrologi legal serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Medan, 2003.

UUD 1945 dan Amandemennya, Amandemen I S/D 4, Fokusmedia, Jakarta, 2004.

Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid I Edisi ke tiga, Gunung Agung, Jakarta